

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR
08 TAHUN 2014 TENTANG PENGOLAHAN SAMPAH OLEH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN (DLHK)
SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mengikuti Sidang Skripsi
Strata 1 pada Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

COVER



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

NURMEILINA HASIBUAN
11775200312

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : NURMEILINA HASIBUAN
NIM : 11775200312
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN
2014 TENTANG PENGOLAHAN SAMPAH
OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN (DLHK)

DISETUJUI OLEH

Dosen Pembimbing


Irdavanti, S.IP, MA
NIK. 130 411 030

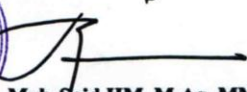
Dekan


Ketua Jurusan

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Program Studi Ilmu Administrasi Negara




Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NURMEILINA HASIBUAN
NIM : 11775200312
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA
PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2014
TENTANG PENGOLAHAN SAMPAH OLEH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN (DLHK)
TANGGAL UJIAN : SELASA, 20 APRIL 2021

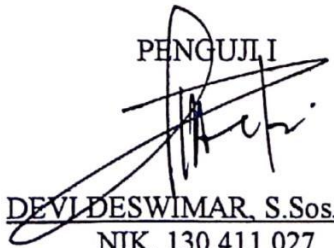
PANITIA PENGUJI

KETUA



FAKHRURROZI, SE, MM
NIP. 19670725 200003 1 002

MENGETAHUI

PENGUJI I


DEVI DESWIMAR, S.Sos, M.Si
NIK. 130 411 027

PENGUJI II


MHD. RAFI, S.Sos, M.Si
NIK. 130 717 059

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR
08 TAHUN 2014 TENTANG PENGOLAHAN SAMPAH OLEH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN (DLHK)**

SKRIPSI

Oleh :

Nurmeilina Hasibuan

11775200312

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan(DLHK). Dan Badan perencanaan pembangunan Daerah. Tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengolahan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan(DLHK) . Jenis penelitian ini Deskriptif dengan metode Kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik penentuan yang peneliti gunakan adalah teknik purposive Sampling, Sedangkan indikator penelitian menggunakan Peraturan Daerah 08 Tahun 2014 Tentang penglahan Sampah dengan 3 Strategi yaitu Strategi pengurangan Sampah, Penangan Sampah, dan Sumber Biaya. Berdasarkan penelitian ini maka dapat disimpulkan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengolahan Sampah kurang berjalan dengan baik hal ini dikarenakan masih menemukan kendala yaitu masih belum jelas keterlibatan pihak swasta dalam pengolahan sampah, kurangnya sarana prasarana dalam pengangkutan sampah, Kurangnya kesadaran dari masyarakat Kota Pekanbaru dalam melakukan pembuangan sampah.

Kata kunci : Implementasi kebijakan, Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah, Sumber Biaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah *Robbil'alam*, puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PENGOLAHAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN (DLHK)** ” Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan wajah dan syafaatnya dihari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teristimewa kepada Kedua Orang Tua Ibunda tercinta Habibah Lubis dan Am. Ayahanda Hasan Basri Hasibuan terimakasih telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil dan selalu mendoakan ananda untuk dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana. Sungguh mulia pengorbanan kedua orang tua. Dengan penuh kesabaran, ketabahan, kasih sayang, serta dukungan untuk keberhasilan ananda hingga saat ini, untuk itu skripsi dipersembahkan untuk kedua orang tua ananda yang sangat ananda sayangi.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Bapak Dr. Drs. H. Muh Said, HM. M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Jhon Afrizal, S.HI, MA selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ikhwani Ratna, S.E, M.Si. selaku Pembimbing Akademik.
6. Ibu Irdayanti S.IP, M.A selaku dosen konsultasi dan dosen pembimbing yang memberikan bimbingan, informasi serta arahan kepada penulis selama menyelesaikan proposal dan skripsi ini hingga selesai.
7. Ibu Abdiana Ilosa, SAP,MPA yang telah memberikan saya semangat dan arahan.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai di Program Studi Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang baik dan bernilai.

9. Untuk keluarga besar Kidam Hasibuan terimakasih telah memberikan perhatian, motivasi, dukungan dan do'a yang membuat peneliti terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk Kakak dan Abang tercinta Nurjannah Hasibuan S.Pd dan abang Abdul Rahman Hasibuan terimakasih atas dukungan, semangat serta motivasinya.
11. Untuk teman seperjuangan Administrasi Negara E 2017 yang sudah berjuang bersama dari awal hingga akhir, dan telah memberikan semangat,dukungan serta do'a dalam menyelesaikan studi ini.
12. Untuk sahabat saya yaitu : Putri Delima Ritonga, Hikmah Ramadani, Lenni Hardiyanti, Reza anggraini yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang tiada henti.
13. Untuk, Sitri Sonia, Istihroh, Afifah Harasta S.Sos, Siti Nurjannah, Selamat Sentosa, Reki Rades Wandri, Zulham Afrilla Afandi, Rida Aulia, Yunita Pratiwi, M. jefri Andri, M. zakie S.Sos, yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini
14. Kepada keluarga besar Kos Damadika yang selalu menyupport dan memberikan motivasi.
15. Kepada keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara (HMJ-ANA) Periode, 2017, 2017-2018, dan 2018-2019
16. Kepada Kepada keluarga Besar Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau Periode 2019- 2020.

17. Kepada Keluarga Besar KKN Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara 2020

Semoga semua motivasi, semangat, do'a serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari ALLAH SWT. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat. *Amin amin yarobal alamin.*

Pekanbaru, April 2020

Nurmeilina Hasibuan

NIM. 11775200312

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	.iii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan penelitian	6
1.4 Manfaat penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pengertian Kebijakan Publik	9
2.2 Implemtasi Kebijakan	14
2.3 Kebijakan Pengolahan	18
2.4 Peraturan Daerah 08 Tahun 2014	20
2.5 Pengolahan Sampah	25
2.6 Penelitian Terdahulu	26
2.7 Kebersihan Dalam Pandangan Islam	29
2.8 Definisi Konsep	30
2.9 Kerangka Pikir	31
2.10 Konsep Operasional	32
BAB III METODELOGI PENELITIAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.2 Jenis Penelitian	34
3.3 Sumber Data	34
3.4 Informan Penelitian.....	35
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	36
3.6 Analisis Data.....	37

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Profil Kota Pekanbaru.....	39
4.2 Penduduk	44
4.3 Wilayah Geografis	44
4.4 Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru	46
4.4 Struktur Pengolaan Sampah DLHK.....	54

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL

5.1 Analisis Strategi Badan Perencanaan Pembagunan Daerah Serta Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi masalah sanitasi persampahan di Kota Pekanbaru	55
5.2 pengurangan sampah	56
5.3 penanganan sampah	61
5.4 sumber Biaya	76
5.5 kendala dalam melaksanakan strategi sanitasi persampahan	80

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 kesimpulan.....	85
6.2 saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkiraan Timbulan Sampah di Kota Pekanbaru	4
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu	26
Tabel 2.2 Indikator Penelitian	33
Tabel 3.1 Key Informan	40
Tabel 3.2 Informan Lainnya.....	40
Tabel 4.1 Nama Kelurahan Dirinci Menurut Status Dan Kecamatan.....	45
Tabel 5.1 Bank Sampah Di Kota Pekanbaru.....	60
Tabel 5.2 Jumlah Rumah Kompos dibawah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru 2021 .	61
Tabel 5.3 Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru januari 2021.....	75
Tabel 5.4 Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Persampahan Dengan Sumber Pendanaan Pemerintah dan Non Pemerintah	78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Area Beresiko Persampahan.....	5
Gambar 2.1 Kerangka Pikir	32
Gambar 4.1 Struktur organisasi.....	57
Gambar 5.2 Hasil Daur Ulang Dari Plastik.....	69
Gambar 5.3 alur pengumpulan sampah sampai tahap pemrosesan akhir sampah.....	73
Gambar 5.4 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar.....	75
Gambar 5.5 Petugas melakukan pengangkutan sampah di perumahan)	77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .

Pada saat ini banyak perkotaan yang berlomba dalam rangka melaksanakan pembangunan, namun pembangunan tersebut dilakukan tanpa memikirkan keseimbangan lingkungan lahan yang ditempati. Hal ini menyebabkan tingkat ketidakseimbangan lingkungan menjadi minim dan menyebabkan kelestarian lingkungan menjadi tidak terjaga. Dampak dari pembangunan ini mengakibatkan terjadi kerusakan lingkungan secara permanen seperti banjir, longsor dan penumpukan sampah yang terjadi selama sepuluh tahun terakhir ini. (Kiky, Suryadi, & Imam Hanafi , 2015)

Lingkungan mempunyai andil yang paling besar terhadap status kesehatan yang disusul oleh perilaku (Kasnodihardjo & Elsi, 2013). Kesehatan lingkungan adalah kondisi atau keadaan lingkungan optimum yang berpengaruh positif terhadap perwujudan status kesehatan optimum. Lingkup kesehatan lingkungan, pembuangan sampah, Lingkungan sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia karena berbagai faktor penyebab penyakit dipengaruhi oleh lingkungan.

Sampah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah) adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pasal 2 UU Pengelolaan Sampah juga mengklasifikasikan sampah yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik. Sedangkan berdasarkan sifatnya sampah dapat dibedakan menjadi sampah organik dan anorganik. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini masih

menjadi problematika yang cukup serius terutama di daerah perkotaan. Tingginya pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi di daerah perkotaan yang mengakibatkan semakin banyak timbulan sampah yang dihasilkan. Selain tingginya angka pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi faktor lain yang menyebabkan bertambahnya timbulan sampah adalah perubahan pola hidup masyarakat. Adanya perubahan pola hidup masyarakat yang sudah menuju era modern pada saat ini membuat masyarakat melakukan banyak aktivitas yang memicu terciptanya berbagai jenis sampah. Sampah yang dapat dihasilkan dari perubahan pola konsumsi masyarakat modern saat ini antara lain seperti sampah kemasan yang berbahaya dan/ atau sulit diurai oleh proses alam. Aktivitas-aktivitas masyarakat yang memicu adanya sampah seperti masyarakat mengkonsumsi makanan cepat saji dan/atau membungkus makanan dari restoran-restoran menghasilkan sampah yang berasal dari bungkus makanan yang dibeli, masyarakat berbelanja juga dapat menghasilkan sampah yang berasal dari kantong belanja, masyarakat melakukan jual beli di Pasar juga menghasilkan sampah yang berasal dari plastik belanja di pasar atau sisa-sisa potongan sayur, ikan, dan daging yang dibersihkan, dan banyak hal lain dari aktivitas masyarakat yang memicu timbulnya berbagai macam sampah. Jenis sampah yang dihasilkan dari banyaknya aktivitas-aktivitas masyarakat tersebut seperti digunakan mengikuti era modern saat ini antara lain seperti sampah kemasan yang berbahaya dan/ atau sulit diurai oleh proses alam.

Sampah merupakan problem pada daerah perkotaan yang memerlukan penanganan dan pengelolaan sampah yang professional. Pengelolaan sampah yang professional dan baik akan menyebabkan terkelolanya sampah sehingga cermin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kota semakin baik. Pertambahan jumlah penduduk di perkotaan yang pesat berdampak terhadap peningkatan jumlah sampah yang di hasilkan pembangunannya, bukan hanya pembangunannya saja melainkan jumlah penduduk, investasi, industri, dan perdagangan yang tidak luput dari masalah sampah karena setiap tahun penduduknya semakin padat.

.Melihat permasalahan sampah yang ada di Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang cukup pesat Dalam pelaksanaannya masih sering ditemukan kendala. Pengelolaan sampah di kota Pekanbaru dapat dilihat dari berbagai perspektif, yaitu aspek teknis dan tingkat pelayanan, kelembagaan, pendanaan, peraturan dan partisipasi masyarakat. untuk itu penulis mengangkat masalah persampahan karena masalah sampah dikota pekanbaru dari hari ke hari semangkit meningkat.

Data dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Sampah mencapai 1.098,95 Ton perhari. Sampah yang masuk ke TPA muara Fajar di perkirakan 714, 32 ton/ perhari. Dari jumlah tersebut 35% nya reduksi langsung oleh masyarakat melalui pengurangan sampah. Permasalahan yang ada pada saat ini adalah area pelayanan persampahan yang tidak dapat menjangkau sudut –sudut kota di sebabkan karena keterbatasan sarana TPS, keterbatasan personil, keterbatasan sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah, proses pengangkutan sampah yang tidak stabil menyebabkan penumpukan sampah baik di lokasi sumber sampah maupun di TPS. Permasalahan dalam pengelolaan Persampahan, Sampah organik dan non-organik masih dibuang dalam satu tempat. Pelaksanaan program pemilahan sampah masih belum memberikan hasil yang memuaskan. Produksi Sampah masih lebih besar daripada sampah yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teranglut. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap iuran dan waktu (timing) pembuangan sampah serta permasalahan yang di hadapi belum adanya pihak pemenang lelang proyek persampahan sehingga anggaran untuk masalah sampah masih belum bisa teratasi.

Tabel 1.1
Perkiraan Timbulan Sampah di Kota Pekanbaru

Kecamatan	Permukiman(1/Org/Hr)			Permukiman (Kg/Org/Hr)		
	Sederhana	Menengah	Mewah	Sederhana	Menengah	Mewah
Tampian	1.32	1.78	1.36	0.58	0.51	0.58
Paying sekaki	1,12	1.23	1.77	0.58	0,44	0.51
Bukit raya	2.38	1.51	1.21	0.55	0,28	0.51
damai Marpoayan	0.98	1.57	1.45	0.46	0.23	0.32
Tenayan raya	1.36	1.01	1.24	0.58	0.48	0.51
Lima puluh	1.28	2.72	1.27	0.26	0.35	0.2
Sail	0.93	0.92	0.92	0.18	0.58	0.16
Pekanbaru kota	1.28	1.34	1.11	0.27	0.23	0,27
Sukajadi	1.60	1.91	1.67	0.27	0.25	0,25
Senampelan	1.18	.72	1.37	0.27	0.28	0.33
Rumbai	1.52	1.50	2.09	0.34	0.21	0.21
Rumbai pesisir	1.18	1.32	2.91	0.26	0.46	0.23

Sumber DLHK 2021

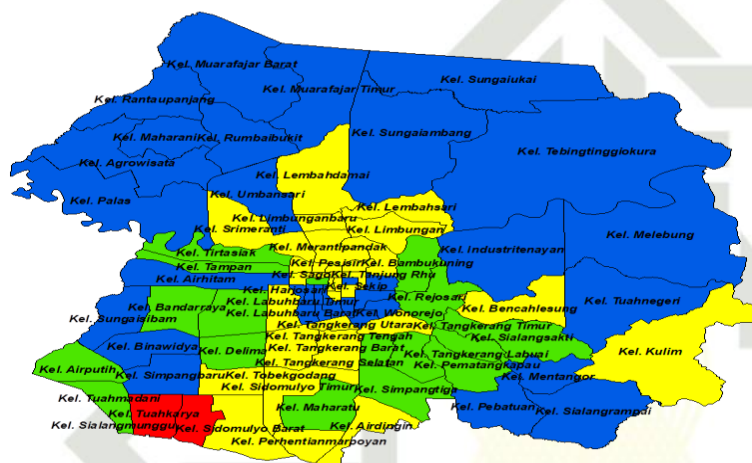
Berdasarkan Peta Area beresiko bahwa Resiko Sangat Tinggi digambarkan pada peta merah dan resiko tinggi berwarna kuning. Terdapat 4 area sangat beresiko di 2 kelurahan yaitu Tuah Karya, dan Sialang Munggu dan dan 4 area resiko tinggi di 5 kelurahan Tanah Datar, Suma Hilang ,Tanjung Ritu, Rintis, Pesisir, Sago, Padang Terubuk, Kampong Dalam, Kampong Baru, Kampong Bandar, Sri Meranti, Tirta Siak, Meranti Pandak, Limbungan Baru, Limbungan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembah, Lembah Damai, Delima, Sialang Minggu, Tangkerang Tengah, Sidumulya Barat, Tabek Gadang, Wonoreje, Tangkerang Tengah, Tangkerang Barat, Sidomulya Timur, Sail, Kulim, Labuh Barat Timur

Gambar 1.1
Peta Area Beresiko Persampahan



Permasalahan Persampahan yang terjadi di kota pekanbaru akan mengakibatkan dampak menurunkan kesehatan dan kesejahteraan manusia, dan akan menimbulkan berbagai macam penyakit bagi masyarakat sekitar. Penyakit tersebut diantaranya adalah timbulnya berbagai macam penyakit menular maupun penyakit kulit serta gangguan pernafasan, maupun kematian.

Dengan demikian berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dibutuhkan Strategi dalam mengatasi masalah sanitasi persampahan di Kota Pekanbaru. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengolahan Sampah Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengolahan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK)
2. sajakah faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK)

Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengolahan Sampah Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK)
2. Untuk mengetahui Apa sajakah faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK)

Manfaat penelitian

Adapun kegunaan dari pada penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis
 1. ini diharapkan meberikan sumbangsi pemikiran terhadap pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya masalah persampahan di kota pekanbaru.
- b. Secara praktis
 1. Untuk menambah wawasan keilmuan peneliti tentang persampahan khususnya di kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. informasi bagi masyarakat tentang implementasi perda 08 tahun 2014 tentang pengolahan sampah di kota Pekanbaru.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I :PENDAHULUAN

Pada Bab I ini berisikan tentang, latar belakang masalah perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :LANDASAN TEORI

Pada Bab II memuat landasan teori berupa, konsep operasional yang melandasi penelitian sehingga dapat mendukung penelitian penulis lakukan.

BAB III :METODE PENELITIAN

Pada Bab III memuat metode penelitian berupa meliputi waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang Sejarah Objek Penelitian, Aktivitas Objek Penelitian dan Struktur Objek Penelitian

BAB V :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan terhadap hasil penelitian

BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang simpulan dari penelitian, Serta Saran yang diperlukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan adalah salah satu konsep dalam ilmu politik. Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan (William N, 2003).

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. (Ramdhan & Ramdhani, 2017)

Lebih lanjut kebijakan memiliki dua aspek , yakni:

- a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.
- b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai kebijakan publik, lebih lanjut (Wahab & Solichin, 2012) menyatakan bahwa:

- a. kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku/ tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan;
- b. kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri;

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya. James E Anderson mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.1.1 Urgensi Kebijakan Publik

Urgensi Kebijakan Publik Untuk melakukan studi kebijakan publik merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Studi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye, sebagaimana dikutip Sholichin Abdul Wahab (Suharno: 2010: 14) sebagai berikut: “Studi kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.”

Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010: 16- 19) dengan mengikuti pendapat dari Anderson (1978) dan Dye (1978) menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgen untuk dipelajari, yaitu:

a. Alasan Ilmiah

Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat.

Dalam hal ini kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat (dependent variable) maupun sebagai variabel independen (independent variable). Kebijakan dipandang sebagai variabel terikat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor. politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik. Kebijakan dipandang sebagai variabel independen jika fokus perhatian tertuju pada dampak kebijakan tertuju pada sistem politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik.

b. Alasan professional

Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari.

c. Alasan Politik

Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.

2.1.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34 adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas. legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d. Tahap implementasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasikan yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Implementasi kebijakan

Implementasi Kebijakan Menurut pendapat Gaffar (2009:295), implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Implementasi kebijakan menurut Djijowjito (2004:158), pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang.

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Edward III dalam Winarno (2002:126) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan adalah:

1. Komunikasi Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber-sumber Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.
3. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku. Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal
4. Struktur birokrasi Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta.

Menurut Sunggono (1994:149), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu sebagai berikut:

- a. Isi kebijakan Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.
- b. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan.
- c. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber dayasumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

- d. Informasi Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.
- e. Dukungan Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
- f. Pembagian Potensi Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi di antara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

2.1 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Suatu implementasi kebijakan akan menghasilkan keberhasilan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Arif Rohman¹⁵ menyatakan, bahwa ada tiga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor yang dapat menentukan kegagalan dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan yaitu:

- a. Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan, menyangkut kalimatnya jelas atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau tidak.
- b. Faktor yang terletak pada personil pelaksana, yakni yang menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana kebijakan. Termasuk dalam personil pelaksana adalah latar belakang budaya, bahasa, serta ideologi kepartaian masing-masing. semua itu akan sangat mempengaruhi cara kerja mereka secara kolektif dalam menjalankan misi implementasi kebijakan.

Faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yakni menyangkut jaringan sistem, hirarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main

2.3. Kebijakan Pengelolaan

Sampah Dalam melakukan pengelolaan sampah harus berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran dalam pengelolaan sampah. Hal ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi dasar hukum pengelolaan sampah di Indonesia adalah sebagaimana di bawah ini :

- a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedomanan Pengelolaan Sampah
3. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-undang ini terdiri atas:

- a. Sampah rumah tangga;
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. Sampah spesifik. Sampah rumah tangga itu berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja. Sampah sejenis sampah rumah tangga itu berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/ atau fasilitas lainnya. Sampah spesifik itu meliputi :

1. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
2. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. Sampah yang timbul akibat bencana; Puing bongkaran bangunan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah terdapat 3 indikator yaitu ; pengurangan sampah, penanganan sampah dan sumber biaya.

2.4.1 Pasal 14

1. pengurangan sampah bagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah.
 - b. Pendaaurulan sampah dan/ atau
 - c. Pemanfaatan kembali sampah
2. Pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai berikut:
 - a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu.
 - b. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan
 - c. Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan
 - d. Memfasilitasi kegiatan menggunakan ulang dan mendaur ulang dan
 - e. Memfasilitasi pemasaran produk- produk daur ulang.
3. Pelaksanaan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sesedikit mungkin, dapat diguna-ulang dapat di daur ulang, dan atau/ mudah di urai oleh proses alam.

2.4.2 pasal 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penangan sampah(pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir)

Penangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b meliputi :

- a. Pemilahan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/ atau sifat sampah.
- b. Pengumpulan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah.
- c. pengangkutan sampah, dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke te,pat pemrosesan akhir.
- d. Pengolahan sampah dalam bentukmengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dan atau
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/ atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

2.4.3 Pasal 33

1. pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pelaksanaan pengolahan sampahsesuai dengan jenis, jumlah dan atau sifat sampah.
2. pembiayaan peneyelenggaraan pengolhan sampah meliputi pembiayaan untuk membangun, memperluas serta meningtkkan pelayanan pengolahan samoah di daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sumber dana untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berasal dari
 - a. Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah.
 - b. Dinas BUMD
 - c. Koperasi
 - d. Badan usaha swasta
 - e. Retribusi sampah, dana masyarakat, dan/ atau
 - f. Sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undang.
4. Pembiayaan kegiatan pengolahan sampah yang dilaksanakan masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
5. Pemerintahan daerah dapat memberikan bantuan kepada masyarakat untuk kegiatan pengolahan sampah yang dikelola di tingkat Rw sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta penentuan peraturan yang berlaku.

Adapun strategi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mengatasi Masalah Persampahan Di Kota Pekanbaru Yaitu Terapat Pada Strategi Sanitasi Kota (SSK) yaitu :

Strategi 1: Meningkatkan koordinasi dan kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah Kota

Adanya peluang bantuan yang cukup besar dari pusat melalui dana APBN untuk persampahan sehingga pemerintah Kota perlu melakukan penguatan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat agar dana/anggaran APBN dapat terserap optimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Strategi 2:

Mengembangkan skema investasi di bidang persampahan untuk menarik lebih banyak pihak swasta

Investasi di bidang pengelolaan persampahan seperti teknologi tepat guna perlu diterapkan di Kota Pekanbaru dalam rangka pengurangan persampahan untuk meningkatkan pelibatan masyarakat dalam rangka pengurangan sampah.

Strategi 3: Meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi

kelompok-kelompok masyarakat yang aktif pada kegiatan 3 R (Reuse, Reduce, Recycle) di Kota Pekanbaru diperlukan penguatan untuk meningkatkan pelibatan masyarakat dalam rangka pengolahan Sampah.

2.5. Pengelolaan Sampah

Konsep Sampah Menurut definisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2006). Undang-undang pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. (Manik, 2003) mendefinisikan sampah sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Dari barisan ini jelas bahwa sampah adalah hasil kegiatan manusia yang dibuang karena sudah tidak berguna. Dengan demikian sampah mengandung prinsip sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Adanya sesuatu benda atau bahan padat,
 - b. Adanya hubungan langsung/tidak langsung dengan kegiatan manusia,
 - c. Benda atau bahan tersebut tidak dipakai lagi
1. Sumber-sumber sampah
 - a. Sampah yang berasal dari pemukiman (domestic wastes) sampah ini terdiri dari bahan-bahan padat sebagai hasil kegiatan rumah tangga yang sudah dipakai dan dibuang, seperti sisa-sisa makanan baik yang sudah dimasak atau belum, bekas pembungkus baik kertas, plastik, daun dan sebagainya, pakaian-pakaian bekas, bahan-bahan bacaan, perabotan rumah tangga, daun-daunan dari kebun atau tanaman.
 - b. Sampah yang berasal dari tempat-tempat umum seperti pasar, tempat-tempat hiburan, terminal bus, stasiun kereta api dan sebagainya.
 - c. Sampah yang berasal dari dari perkantoran baik dari perkantoran pendidikan, perdagangan, departemen, perusahaan dan sebagainya.
 - d. Sampah yang berasal dari jalanan raya sampah ini berasal dari pembersihan jalan yang umumnya terdiri dari : kertaskertas, kardus-kardus, debu, batuan-batuan dan sebagainya.
 - e. Sampah yang berasal dari industri (industri wastes) sampah ini berasal dari kawasan industri, termasuk sampah yang berasal dari pembangunan industri, dan segala sampah yang berassal dari proses produksi, misalnya sampah-sampah pengepakan barang, logam dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jenis Sampah

a. Sampah berdasarkan zat kimia yang terkandung didalamnya

1. Sampah anorganik Sampah anorganik adalah sampah yang umumnya tidak dapat membusuk, misalnya : logam/besi, pecahan gelas dan sebagainya.

2. Sampah organik Sampah organik adalah sampah yang ada pada umumnya dapat membusuk, misalnya : sisa-sisa makanan, daun-daunan dan sebagainya.

b. Sampah berdasarkan dapat dan tidaknya terbakar

1. Sampah yang mudah terbakar, misalnya : kertas, karet, kayu dan sebagainya.

2. Sampah yang tidak dapat terbakar, misalnya : kaleng bekas, besi/logam bekas dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka pemikiran penelitian. Selain itu, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang ada

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Pembahasan	Perbedaan
1	Yudi Anugerah Purwadi JOM FISIP Vol. 4 No. 2 Oktober 2017	Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Tentang Forum Masyarakat Peduli Sampah)	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya peran Forum Komunitas Tentang Sampah di Kota Pekanbaru. Dinas Kebersihan dan Tata Kota Pekanbaru Belum optimalnya implementasi Perda Pekanbaru No. 8 Tahun 2014 khususnya Pasal 40. Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji pelaksanaan dan faktor penghambat.	Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu tentang faktor penghambatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Putri Irna Dessih Sinaga , JOM FISIP Vol. 4 No. 2 Oktober 2017	Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Tampan)	pemerintah mengeluarkan peraturan daerah (perda) nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Nyatanya, di Tampan masih banyak dijumpai sampah di setiap sisi jalan sepanjang hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peraturan daerah tersebut diterapkan	Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu peneliti membahasa kerjasama, factor penghambat dari peraturan tersebut.
3	Haru,2014. 1-14	Strategi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam Menanggulangi Kebersihan Di Kota Pekanbaru	Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implemntasi strategi kantor dinas lingkungan hidup dan kebersihan dalam menyelesaikan masalah kebersihan di kota pekanbaru Dalam pelaksanaan pembangunan selalu	Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu pada tahun 2021 terdapat permasalahann anggara, pihak swasta dan kurangnya alahan tempat pembunagn sampah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan seperti masalah sosial, budaya, ekonomi, keamanan dan ketertiban umum. Salah satu permasalahan yang mendasar pada Pemerintah Kota Pekanbaru	
4	Ernawaty Zulkarnain Yusni Ikhwan Siregar Bahruddin, Dinamika Lingkungan Indonesia , volume 6 nomor 2	Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan sampah Kota Pekanbaru serta untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah Kota Pekanbaru. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan sampah Pekanbaru belum maksimal,	Perbedaan dengan yang peneliti lakukan yaitu peneliti lebih mengkaji bagaimana implentasi pada perda tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebersihan Dalam Pandangan Islam

Dalam Alquran banyak dijelaskan ayat-ayat mengenai kebersihan diantaranya:

a. QS. Al- a'raf 55- 58

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ تَخْرُجُ الْمَوْتُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya : Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya Rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan .(57) Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan kedatangan rahmat-Nya (hujan), sehingga apabila angin membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian Kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

b. Qs. Maryam Ayat 13

وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا ۝١٣

Artinya : dan (Kami jadikan) rasa kasih sayang (kepada sesama) dari

Kami dan bersih (dari dosa). Dan dia pun seorang yang bertakwa,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi Konsep

Berdasarkan uraian konsep diatas dapat dirumuskan definisi konsep karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

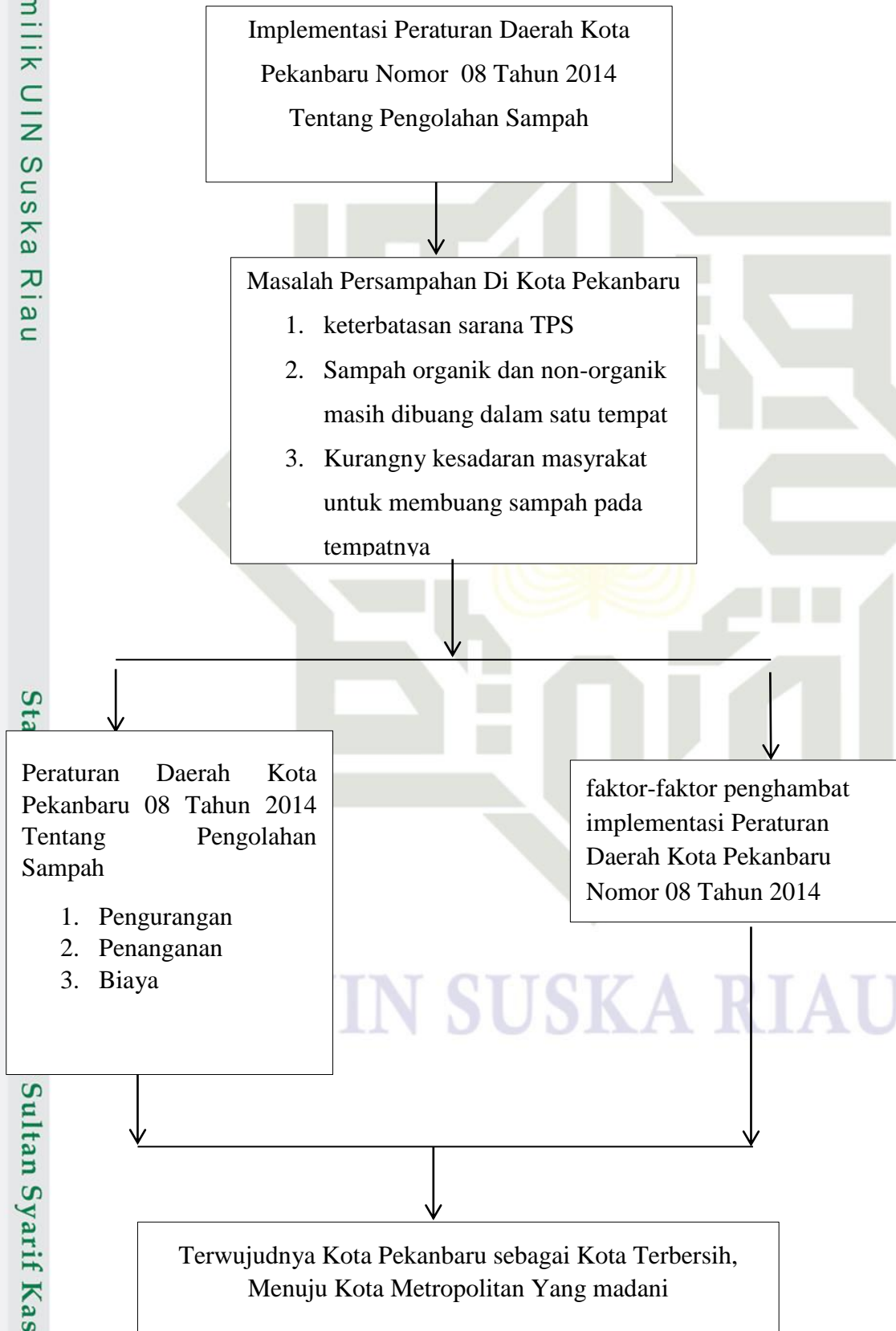
- a. Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. (Iskandar, 2012)
- b. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas.
- c. Pengelolaan sampah
Sampah Menurut definisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerangka Pikir

Gambar 2.1
kerangka pemikiran



2.10 Indikator Penelitian.

Tabel 2.2
Indikator Penelitian

Refrensi	Indikator	Sub. Imdikator
Analisi Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Serta dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Mengatasi Masalah Sanitasi Persampahan Di Kota Pekanbaru	1.Strategi Pengurangan	a. Pembatasan Timbunan Sampah b. Bank Sampah c. Pemanfaatan kembali Sampah
	2..Strategi Penanganan	a. Koordinasi b. Keterlibatan masyarakat c. SDM d. TPA e. Proses pengangkutan sampah
	3. Sumber biaya	a. pemerintah dan Non pemerintah b. Retribusi

Peraturan Daerah 08 Tahun 2014 tentang pengolahan sampa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian Dilaksanakan Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Waktu penelitian dilakukan sejak bulan Januari 2021 sampai 23 Maret 2021.

3.2 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif dengan Metode Deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dengan cara mendeskripsikan secara langsung fenomena yang terjadi pada objek penelitian. perbandingan atau hubungan antara variabel satu dengan lainnya.

3.3 Sumber Data

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi :

Data Primer, Menurut (Istijanto, 2005) data primer merupakan data yang langsung diperoleh oleh sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian yaitu observasi berupa pendapat informan tentang masalah Sanitasi di Kota Pekanbaru serta hasil wawancara dengan informan penelitian untuk memperjelas hasil observasi tersebut.

Data Sekunder, umumnya berupa bukti, catatan atas laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data Sekunder ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Riset kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku - buku referensi, laporan - laporan, jurnal - jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.
2. Dokumentasi adalah catatan sanitasi yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan ataupun gambar yang di gunakan di badan perencanaan pembangunan daerah kota pekanbaru.
3. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 Tentang Pengolahan Sampah

3.4 Informan Penelitian

Penentuan subjek dilakukan berdasarkan metode purposive smpling yaitu peneliti menentukan sendiri sampel/ informasi berdasrakan krikteria tertentu yang telah peneliti tetapkan. Untuk teknik yang peneliti gunakan dalam pengambilan sample, peneliti menggunakan teknik *key informan*. Adapun yang peneliti tetapkan sebagai *key informan* adalah subject ataupun individu serta lembaga yang peneliti anggap mampu mengetahui permasalahan ini.

Krikteria Informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru yang mempunyai pengetahuan dalam kerjasama pengolahan sampah
2. Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan yang mempunyai informasi tentang sanitasi persampahan sekaligus yg menjalankan pembangunan sanitasi
3. Masyarakat yang merasakan dampak dari sanitasi persampahan tersebut.

Tabel 3.1
Key Informan

No	Nama	Jabatan
1	Dody Rinaldy S.T	Sekbid Infrastruktur dan Kewilayahan
2	Abror S.E	Kepala Bidang pengolahan Sampah
3	Syahdi Chandra S.E, M.Si	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
4	Novran	Pegawai Dinas lingkungan Hidup
5	Syamsurizal	Supir pengangkut Sampah

Sumber Data Olahan 2021

Tabel 3.2
Informan Lainnya

No	Nama	Jabatan
1	Rudi	Mandor
3	Dhani Santoso	Masyarakat
4	Jhony	Masyarakat
5	Evi	Masyarakat
6	Sutino	Masyarakat (Pedagang)

Sumber Data olahan 2021

Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya maka dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data menurut (Sugiyono, 2014) sebagai berikut :

a. Observasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu sebagai pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu, untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang diinginkan.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai yang mengetahui pasti tentang strategi dan masalah Sanitasi di Kota Pekanbaru

c. Dokumentasi

yaitu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik. (Moleong, 2005)

Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data ke dalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang telah didapatkan (Sugiyono, 2014) Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data menurut Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2014) yaitu :

a. Reduksi data

Mereduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data menunjuk pada

proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abtaksi dan pentransformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Data yang sudah direduksi dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data yang tepat dan akurat.

Penyajian data,

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari lapangan yang dituangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa adanya rekayasa dan penambahan yang tidak sesuai dengan penelitian. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar penyajian data yang telah direduksi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti telah berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat sesuai dengan permasalahan dan keadaan yang terdapat pada objek penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian. Maka barulah didapatkan kesimpulan yang sempurna yang sesuai dengan jenis dan permasalahan penelitian. Dari beberapa data yang diperoleh kemudian dikembangkan dengan kerangka pemikiran dan teori yang telah didapat agar kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak melenceng dari permasalahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Profil Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SK Kerajaan Bersluit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut distrik ;

2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru;
- Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO;
3. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B; UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil;
4. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil;
5. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja;
6. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau;
7. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru;
8. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

4.1.1 Administrasi Pemerintahan Kota Pekanbaru

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

46.50 km . Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya.

4.1.2 Visi Kota Pekanbaru

Pernyataan visi yang dirumuskan oleh aparat penyelenggara pemerintahan Kota Pekanbaru menuju tahun 2021, yaitu “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat yang Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”. Kota Pekanbaru memiliki slogan yaitu **“KOTAKU, KOTAMU DAN KOTA KITA BERTUAH”**, dan motto **“BERSIH, TERTIB, USAHA BERSAMA, AMAN dan HARMONIS”**.

Tabel 4.1

Nama Kelurahan Dirinci Menurut Status Dan Kecamatan

KECAMATAN	KELURAHAN	STATUS KECAMATAN
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Tampan	Kelurahan
	Simpang Baru Sidomulyo Barat Tuah Karya Delima Tuah Madani Sialang Munggu Tobek Godang Bina Widya Air Putih	
	Kelurahan	Kelurahan
	Labuh Baru Timur Tampan Air Hitam Labuh Baru Barat Bandar Raya Sungai Sibam Tirta Siak	
	Marpoyan	Kelurahan
	Tangkerang Tengah Tangkerang Barat	

	Maharatu Sidomulyo Timur Wonorejo Perhentian Marpoyan	
Bukit Raya	Simpang Tiga Tangkerang Selatan Tangkerang Utara Tangkerang Labuai Air Dingin	Kelurahan
Tenayan Raya	Kulim Tangkerang Timur Rejosari Bencah Lesung Sialang Rampai Pematang Mentangor Pematang Kapau Sialang Sakti Buah Negeri Melebung Industri Tenayan Bambu Kuning	Kelurahan
Lima Puluh	Rintis Sekip Tanjung Rhu Pesisir	Kelurahan
Sail	Cinta Raja Sukamaju Sukamulia	Kelurahan
Pekanbaru Kota	Simpang Empat Sumahilang Tanah Datar Kota Baru Sukaramai Kota Tinggi	Kelurahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sukajadi	Jadirejo Kampung Tengah Kampung Melayu Kedung Sari Arjosari Sukajadi Pulau Karam	Kelurahan
Senapelan	Padang Bulan Padang Terubuk Sago Kampung Dalam Kampung Bandar Kampung Bru	Kelurahan
Rumbai	Umban Sari Rumbai Bukit Muara Fajar Palas Sri Meranti Agrowisata Maharani Rantau Panjang Muara Fajar Barat	Kelurahan
Rumbai Pesisir	Meranti Pandak Limbungan Lembah Sari Limbungan Baru Lembah Damai Tebing Tinggi Okura Sungai Ambang Sungai Ukui	Kelurahan

Sumber: Kota Pekanbaru dalam Angka 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Penduduk

Masalah penduduk di Kota Pekanbaru sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang, serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan. Jumlah penduduk Kota Pekanbaru berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2017 sebanyak 1.091.088 jiwa dan tahun 2018 sebanyak 1.117.359 jiwa. Penduduk Kota Pekanbaru mengalami pertambahan sebanyak 26.271 jiwa (2.35%). Apabila dilihat dari Kecamatan, daerah dengan jumlah penduduk terbesar ada di Kecamatan Tampan yakni 307.947 jiwa sedangkan daerah dengan jumlah penduduk terkecil ada di Kecamatan Sail dengan jumlah penduduk 21.492 jiwa.

4.3 Wilayah Geografis

4.3.1 Letak dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara 101 14 Bujur Timur dan 0 25 -0 45 Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan luas berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 5-11 meter berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96$ Km menjadi $\pm 46,50$ Km , terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran /pematokan di lapangan oleh BPN Tk.I Riau maka ditetapkan luas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih tepatnya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 menjadi 83 Kelurahan.

4.3.2 Batas

Kota Pekanbaru Berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

4.3.3 Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

4.3.4 Iklim

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis minimum 20,40 C dan suhu udara maksimum 36,40 C. Dengan hujan perbulan pada tahun 2018 berkisar 68-92 mm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.5 Jarak Ibukota

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai berikut:

No	Kota	Kabupaten/Kota	Jarak
1	Pekanbaru	Taluk Kuantan	118 Km
2	Pekanbaru	Rengat	159 Km
3	Pekanbaru	Tembilahan	213.5 Km
4	Pekanbaru	Pangkalan Kerinci	33.5 Km
5	Pekanbaru	Siak	74.5 Km
6	Pekanbaru	Bangkinang	51 Km
7	Pekanbaru	Pasir Pengaraian	132.5 Km
8	Pekanbaru	Bengkalis	128 Km
9	Pekanbaru	Bagan Siapi-API	192,5 Km
10	Pekanbaru	Dumai	125 Km
11	Pekanbaru	Selat Panjang	141

Sumber: Kota Pekanbaru dalam Angka 2021

4.4 Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru

4.4.1 Visi dan Misi

Visi dan Misi Bappeda Kota Pekanbaru Mengacu pada visi Kota Pekanbaru, dengan dilatarbelakangi oleh tugas dan fungsi BAPPEDA sebagai unit perencanaan daerah, maka dirumuskan visi BAPPEDA Kota Pekanbaru untuk mewujudkan kondisi dan kompetensi Bappeda Kota Pekanbaru yang lebih baik di masa yang akan datang. Selanjutnya dituangkan dalam Renstra-OPD. Adapun visi BAPPEDA Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 adalah “Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis menuju Pekanbaru smartcity

4.4.2 Uraian tugas dan Tanggung Jawab

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Bappeda ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 185 Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

a. Kepala Badan

1. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan tugas pembantuan lainnya.
2. Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan petunjuk pimpinan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pembangunan daerah.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

5. Sekretariat

1. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - a. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - c. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada BAPPEDA;
 - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup BAPPEDA;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan urusan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - b. Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
 - c. Melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - e. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
 - f. Mengoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah.
- h. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- k. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- l. Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas
2. membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- h. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota;
- i. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

1. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan

dalam melaksanakan urusan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.

2. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
- h. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota.
- k. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan

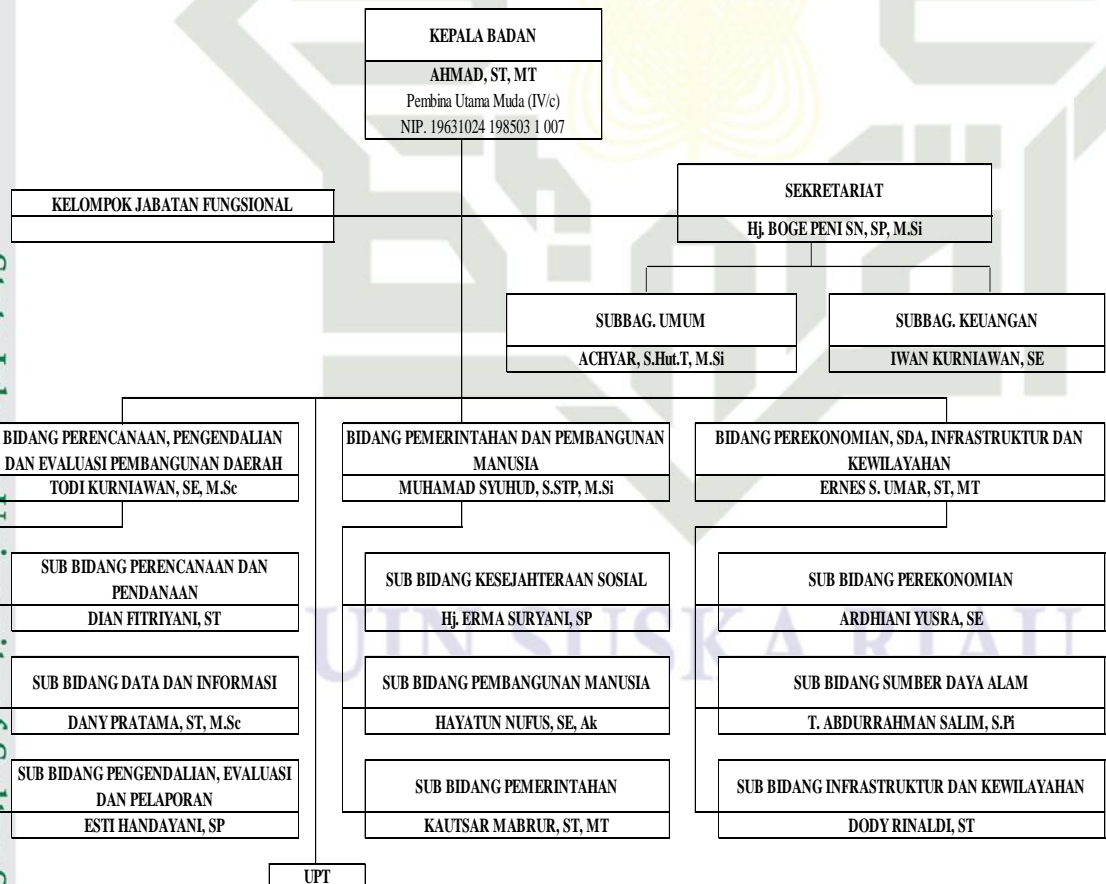
4.3 Struktur Organisasi Bappeda Kota Pekanbaru

Gambar 4.1

Struktur Organisasi

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PE
NOMOR : 185 TAHUN 202
TANGGAL : 23 DESEMBER

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PEKANBARU



KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PEKANBARU

AHMAD, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19631024 198503 1 007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Struktur Pengolaan Sampah DLHK

Berdasarkan peraturan walikota pekanbaru nomor 103 tahun 2016 yang di keluarkan tanggal 30 september 2016 struktur dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru memiliki empat bidang yaitu:

1. Bidang Tata Lingkungan
 - Seksi investariasi dan perencanaan lingkungan
 - Seksi kajian dan evaluasi dampak lingkungan
 - Seksi konvervasi, perubahan iklim dan kerusakan lingkungan hidup
2. Bidang Pengolaan Sampah
 - Seksi pengurangan dan pemanfaat sampah
 - Seksi penangan dan pemrosesan akhir sampah
 - Seksi sarana dan prasarana
3. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
 - seksi pemantauan lingkungan
 - Seksi pengendalian pencemaran lingkungan
 - Seksi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun da limbah bahan berbahaya.
4. Bidang Pemanfaatn Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
 - seksi penengakan hukum lingkungan Seksi penigkatan kapasitas, informasi, dan komunikasi lingkungan
 - Seksi retribusi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan Mengenai Implentasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengolahan) dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melaksanakan pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan belum bisa dikatakan baik, karena dalam tahap pengurangan sampah ini, masih terjadinya pembauran sampah antara sampah yang bisa diolah, sampah yang bisa didaur ulang maupun sampah yang gak bisa diolah dan didaur ulang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar, sehingga belum maksimal dalam pendaur ulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah.

Dilihat dari segi penanganan sampah masih dikategorikan belum baik, karena masih belum tersedianya tempat khusus oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru untuk sampah basah dan sampah kering di masyarakat, dilihat juga dari sarana dan prasana yang masih kurang. Seperti kurangnya jumlah mobil yang beroperasi untuk pengangkutan sampah dan kurangnya jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) kotapekanbaru. Dilhat dari pembiayaan sanitasi persampahan bahwa biaya persampahan bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengolahan sampah yaitu belum adanya pemenang lelang proyek persampahan oleh pihak ketiga sehingga masalah persampahan kembali ditangani oleh pemerintahan kota , masih

kurangnya kesadaran masyarakat untuk pembuangan sampah dan masih kurangnya sarana prasarana dalam pengangkutan sampah serta perlu adanya perluasan lahan untuk tempat pembuangan akhir (TPA) .

2. Saran

- a. Pemerintahan Kota harus secepatnya mengadakan lelang proyek persampahan agar pihak ketiga (swasta) bisa membantu masalah persampahan di kota pekanbaru.
- b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru harus menyediakan tempat khusus untuk sampah basah dan sampah kering di lingkungan masyarakat sehingga tidak terjadinya pembauran sampah yang menyebabkan bau busuk. Dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru juga harus menambah jumlah armada agar pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru bisa berjalan secara baik.
- c. Sosialisasi maupun penyuluhan kepada masyarakat harus lebih sering dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang lingkungan sehat dan bersih serta pengetahuan tentang pengelolaan sampah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen

Bappeda. (2020). *Dokumen*. Pekanbaru.

Menri, & kesehatan Indonesia. (1992).

Jurnal/Skripsi

Heru. (2014). Strategi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam Menanggulangi Kebersihan Di Kota Pekanbaru. *Jom FISIP*, 1(2), 1-15.

Hutapea. (2017). Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Kawasan Wisata Muara Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara. *jurna Organisasi Manajemen*, 4(1).

Kasnodiardjo, & Elsi, E. (2013). Deskripsi Sanitasi Lingkungan, Perilaku Ibu, dan Kesehatan Anak. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 7(9), 415-520.

Nina Herlina, S. M. (2019). Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di indonesia . *JKLH*, 1-2.

Ramdhan, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.

Sadrajat, A. E. (2018). Kajian Daerah Resiko Sanitasi Kabupaten Pekalongan. *jurnal Kesehatan Lingkungan*, 34-36.

Herwadi, y. a. 2017, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Studi Tentang Forum Masyarakat Peduli Sampah*. *Jom Fisip* , 4(2), 1-14

Buku

- Hariadi, B. (2005). *Strategi Pemerintah*. Malang: Bayumedia Publishing
- Istijanto. (2005). *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Indonesia: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kuncoro, M. (2006). *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga.
- Listyaningsih. (2014). *Administrasi Pembangunan, Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, L. J. (2005). *metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Randy R, W., & Riant, N. (2007). *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Riyadi, & Deddy, S. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Suryono. (2004). *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang, UM. Press.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Todaro, M., & Smith, S. (2008). *Pembangunan ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Wahab, A., & Solichin. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- William N,D. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada university press.
- Atan, Gaffar. 2009. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengolahan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK)

Nama : Nurmeilina Hasibuan

Nim : 11775200312

Purusan : Ilmu Administrasi Negara

Menyangkut tentang keadaan lingkungan tentang masalah sanitasi persampahan, visi misi perencanaan Strategi Sanitasi Kota(SSK), dan langkah langkah Bappeda dalam mengatasi masalah persampahan di Kota Pekanbaru.

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

1. Bagaimana keadaan lingkungan persampahan di kota pekanbaru?
2. Apa saja langkah-langkah /strategi dalam mengatasi masalah sanitasi persampahan tersebut ?
3. Apakah ada kebijakan yang di buat dalam melaksanakan pembangunan persampahan di kota pekanbaru?
4. Dari mana anggaran sanitasi persampahan?
5. Apa saja kendala yang di rasakan dari pihak BAPPEDA dalam melaksanakan pokja dengan OPD lain.

b. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan(DLHK)

- Strategi pengurangan Sampah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pada kebijakan perda 08 tahun 2014 tentang pengolahan sampah bagaimana cara pengurangan sampah ?
2. Apa saja yang dilakukan untuk penimbunan sampah?
3. Apa manfaat dari bank sampah?
4. Berapa bank sampah yang ada di pekanbaru?
5. Bagaimana cara agar sampah bisa dimanfaatkan kembali?
6. Berapa rumah kompos yang ada di pekanbaru?
7. Apa saja kendala dalam pengurangan sampah di pekanbaru?

- Strategi Penangan Sampah

1. Bagaimana tahap dalam penanganan sampah di kota pekanbaru?
2. Bagaimana koordinasi antara pihak Bappeda dan DLHK dalam mengatasi masalah sanitasi persampahan di kota pekanbaru?
3. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam penangan sampah ?
4. Siapa saja pihak yang terlibat dalam penangan sampah di kota pekanbaru?
5. Bagaimana alur tahap pemrosesan akhir sampah ?
6. Bagaimana system yang diterapkan dalam proses pengangkutan sampah?
7. Apa saja kendala dalam pengurangan sampah di pekanbaru?

- Sumber Biaya

1. Darimana sumber biaya dalam pengolahan sampah di pekanbaru ?
2. Apakah retribusi yang diterapkan sesuai dengan yang dijalankan?
3. Apakah masyarakat membayar retribusi sesuai dengan peraturan yang telah di buat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apakah ada perbedaan tariff antara masyarakat?
5. Apakah ada kendala dari segi anggaran dalam pengolahan sampah dipekanbaru?

c. Masyarakat

1. Apakah masyarakat membayar sampah setiap bulan nya ?
2. Apakah masyarakat merasa keberatan akan tariff pengangkutan smapah
3. Apa pemerintah sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi nya ?
4. Apakah pernah masyarakat mendapatkan denda karena membuang sampah sembarangan?
5. Apakah masyarakat sudah mematuhi peraturan tentang pengolahan sampah?
6. Apakah kendala yang dirasakan masyarakat dalam pengolahan sampah yang diterapkan oleh pemerintah ?



**PERATURAN DAERAH
KOTA PEKANBARU**

NOMOR 08 TAHUN 2014

**TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2014**

- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan bahan yang dapat digunakan, didaur-ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Pelaku usaha dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 15

Penanganan Sampah, (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah)

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi :

- a. pemilahan sampah, dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
- b. pengumpulan sampah, dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- c. pengangkutan sampah, dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
- d. pengolahan sampah, dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah, dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 16

- (1) Pemilahan sampah dilaksanakan dengan menyediakan wadah penampung sampah berdasarkan jenis sampah dan menempatkan sampah sesuai dengan jenisnya pada wadah sampah yang disediakan.
- (2) Penyediaan wadah penampung sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di setiap rumah tangga, pertokoan, mall/plasa, perkantoran, pabrik, fasilitas umum, fasilitas sosial, apartemen/rumah susun, area pelayanan publik, tempat ibadah, pasar, hotel, restoran, tempat wisata atau tempat sejenis lainnya.
- (3) Pelaksanaan pemilahan sampah dilakukan mulai dari tempat penampungan sampah di lokasi sumber sampah, TPS, hingga di TPA.

Pasal 17

- (1) Penyediaan wadah pemilahan sampah yang berasal dari rumah tangga dapat disediakan oleh setiap orang sesuai kebutuhan masing-masing.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan wadah penampung sampah menurut jenisnya di area pelayanan publik atau fasilitas publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan di ruang terbuka publik, sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan mengenai ukuran, bentuk dan konstruksi tempat pewadahan sampah di pertokoan, mall/plasa, perkantoran, pabrik, fasilitas umum, fasilitas sosial, apartemen/rumah susun, area pelayanan publik, tempat ibadah, pasar, hotel, restoran, tempat wisata ditetapkan melalui Peraturan Walikota.

Pasal 18

Wadah sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibedakan sebagai berikut :

- a. wadah warna hijau untuk jenis sampah organik.
- b. wadah warna kuning untuk jenis sampah anorganik.
- c. wadah warna merah untuk jenis sampah spesifik.

Pasal 19

Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan terhadap sampah sebagai berikut :

- a. sampah berasal dari rumah tangga.
- b. sampah berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus.
- c. sampah berasal dari fasilitas umum, sosial dan fasilitas lainnya.
- d. sampah berasal dari jalan.
- e. sampah berasal dari taman.
- f. sampah berasal dari saluran air/sungai/drainase/kali/waduk/situ/kolam;
dan
- g. sampah berasal dari lokasi sejenis lainnya.

Pasal 20

- (1) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

- (2) Pengumpulan sampah dan Tempat Penampungan Sementara/TPS dan atau TPS 3R dan atau TPST dilakukan oleh:
- a. dinas.
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus atau lembaga pengelola sampah tingkat RT/RW; dan atau.
 - c. pihak ketiga yang terikat dalam perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah atau yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan sampah rumah tangga dapat dilakukan dengan :
- a. pola individu langsung.
 - b. pola operasional individu tidak langsung; dan
 - c. pola operasional komunal langsung.
- (4) Pengumpulan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sampah organik dilakukan setiap hari dan untuk sampah anorganik sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam seminggu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pengumpulan dan tempat pemindahan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c dilaksanakan dengan sistem :
- a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pengangkutan sampah selain dilakukan oleh Dinas, dapat dilakukan oleh :
- a. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus atau lembaga pengelola sampah tingkat RT/RW; dan atau
 - b. Pihak ketiga yang terikat dalam perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah atau yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Pengangkutan sampah yang khusus berasal dari saluran air/sungai/drainase/kali/waduk/ situ/kolam, dilakukan oleh dinas dan/atau pihak lain yang diberikan tugas untuk mengangkut sampah ke TPA.

- (4) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membawa sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST/TPA, dan/atau dari TPS/TPST ke TPA.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Stasiun Peralihan Antara untuk mendukung kegiatan pengangkutan sampah.
- (6) Pengangkutan sampah dilaksanakan dengan cara yang menjamin tetap terpilahnya sampah berdasarkan jenis sampah, hingga ke TPS/TPST/TPA, dan tidak tercecer di perjalanan selama dalam proses pengangkutannya.
- (7) Sampah diangkut dengan menggunakan alat pengangkut sampah yang memenuhi standar/persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan terdiri atas :
 - a. lokasi 3R.
 - b. pusat 3R.
 - c. TPS/TPST; dan
 - d. TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pemadatan.
 - b. pengomposan.
 - c. daur-ulang materi; dan/atau
 - d. daur-ulang energi.
- (3) Pengelolaan kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, menyediakan fasilitas pengelolaan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (4) Pemerintahan Daerah menyediakan fasilitas pengelolaan sampah pada wilayah pemukiman yang berupa :
 - a. TPS 3R.
 - b. Stasiun Peralihan Antara.
 - c. TPA.

- (3) angkutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling kurang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. kondisi angkutan sampah yang laik jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. kendaraan angkutan sampah harus dibuat sedemikian rupa sehingga sampah yang diangkut tidak tercecer.
- (4) Dalam hal angkutan sampah dilakukan oleh pihak ketiga maka harus mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang angkutan sampah diatur oleh Peraturan Walikota.

BAB V
PENGELOLAAN SAMPAH
Bagian Pertama
Umum

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi pembiayaan untuk membangun, memperluas serta meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah di daerah.
- (3) Sumber dana untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
 - b. Dinas; BUMD
 - c. Koperasi.
 - d. Badan Usaha Swasta.
 - e. Retribusi sampah, dana masyarakat; dan/atau
 - f. Sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembiayaan kegiatan pengelolaan sampah yang dilaksanakan masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada masyarakat untuk kegiatan pengelolaan sampah yang dikelola di tingkat RW sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Paragraf 1

Sistem Pembiayaan Pengelolaan Sampah

Pasal 34

- (1) Dalam hal pembiayaan pengembangan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh koperasi dan badan usaha swasta maka Pemerintah Daerah :
 - a. dapat mengevaluasi dan atau menilai prastudi kelayakan yang diajukan pengusul.
 - b. memberikan kemudahan perizinan.
 - c. memberikan konsultasi dan fasilitasi.
 - d. memfasilitasi proses kerja sama.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengatur sistem pembiayaan dan pola investasi untuk terwujudnya iklim investasi yang kondusif sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 2

Retribusi dan Iuran Sampah

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.
- (3) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi:
 - a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPST.
 - b. biaya pengangkutan dari TPS/TPST ke TPA.
 - c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. biaya pengelolaan.
- (4) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri, anggota kelompok masyarakat dapat dikenakan iuran berdasarkan kesepakatan bersama.
- (6) Pengelolaan iuran sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat yang bersangkutan.

Paragraf 3

Peran serta masyarakat

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan.
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
 - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi.
 - b. mobilisasi.
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif.

Dokumentasi Rapat Pokja



© Hak Cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Todi Kurniawan S.E, M.Sc



Dokumentasi Wawancara Berasama Bapak Dody Rinaldy S.T



Dokumentasi Bersama Bapak Abror S.E



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi Bersama Bapak Novran S.Psi



Dokumentasi Bersama Bapak syahdi Chandra



2021/03/04 08:14

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi Bersama Bapak Syamsurizal

© Hak



arif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Berssama Mayyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/248/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 12 Maret 2021 M
28 Rajab 1442 H

Kepada
Yth. **Irdyanti, S.I.P, M.A.**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : Nurmeilina Hasibuan
NIM : 11775200312
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun skripsi dengan judul : **Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengolahan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (Dlhk)**“sehubungan dengan itu kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga



/Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti. MS, SE, M.Si, Ak, C
NIP. 19751112 199903 2 001

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4316/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Pra Riset**

Pekanbaru, 15 Desember 2020 M
29 Rabiul Akhir 1442 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Nama : Nurmeilina Hasibuan
NIM. : 11775200312
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Pra Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul :
"Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014
Tentang Pengolahan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
(Dlhk)" Untuk itu kami mohon kiranya saudara berkenan memberikan bantuan
yang di perlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama saudara di ucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/171/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 10 Maret 2021 M
26 Rajab 1442 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau:

Nama : Nurmeilina Hasibuan
NIM. : 11775200312
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi berjudul :
"Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014
Tentang Pengolahan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
(Dlhk)." Untuk itu kami mohon kiranya saudara berkenan memberikan bantuan yang
diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/37742
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/171/2021 Tanggal 14 Januari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | NURMEILINA HASIBUAN |
| 2. NIM / KTP | : | 11775200312 |
| 3. Program Studi | : | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PENGOLAHAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN (DLHK) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. KANTOR BAPPEDA KOTA PEKANBARU
2. DINAS PUPR KOTA PEKANBARU
3. DINAS KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 Januari 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2021/218



- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/37742 tanggal 18 Januari 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : NURMEILINA HASIBUAN
2. NIM : 11775200312
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ADMINISITRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. KAMPUNG BARU KEL. KARTINI KEC. RANTAU UTARA KAB. LABUHANBATU-SUMATERA UTARA
7. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PENGOLAHAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN (DLHK)
8. Lokasi Penelitian : 1. DINAS KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKANBARU
2. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 Januari 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru
Sekretaris



H. MAISCO, S.Sos, M.Si
Rembina Tingkat I
NIP. 19710514 199403 1 007

Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yana Bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
JALAN ABDUL RAHMAN HAMID KEL. TUAH NEGERI KEC. TENAYAN RAYA
Email : bappedapku@gmail.com
PEKANBARU

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 090/BAPPEDA-SEKR/198/2021

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Menerangkan :

Nama : NURMEILINA HASIBUAN
NIM : 11775200312
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Jurusan : Administrasi Negara
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melaksanakan Pengambilan Data dan Penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru berdasarkan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 071/BKBP-SKP/2021/218 tanggal 27 Januari 2021, dengan Judul Penelitian "Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengolahan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (Dihk)."

Demikian Surat keterangan ini diberikan, kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

a.n. KEPALA BAPPEDA KOTA PEKANBARU
SEKRETARIS,


H. BOGE PENI SN, SP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19700121 199603 2 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Koordinator Prodi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Qasim Riau
2. Arsip

BIOGRAFI PENULIS



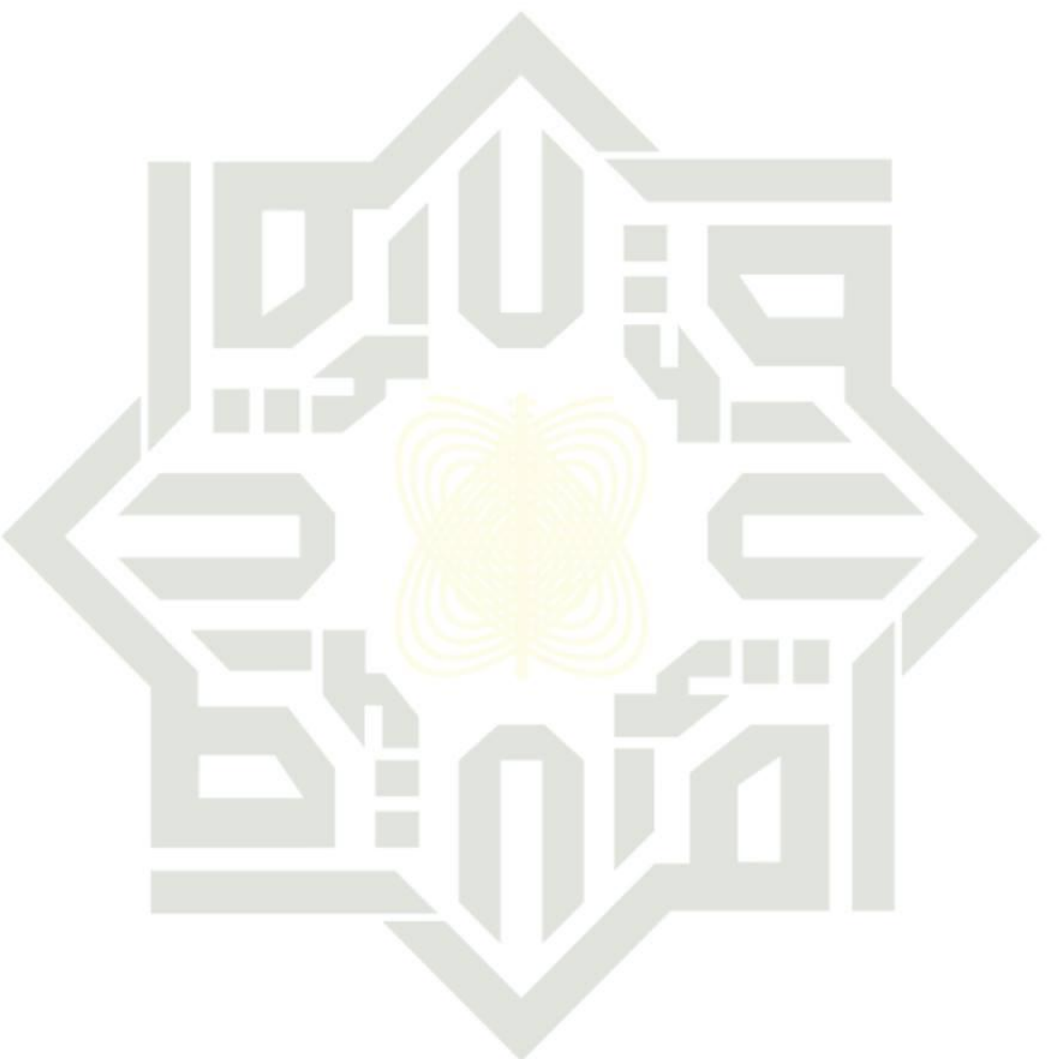
Nurmeilina Hasibuan, dilahirkan di kota Rantau Prapat pada tanggal 12 Mei 1999. Anak dari Bapak Hasan Basri Hasibuan dan ibu Habibah Lubis, Merupakan anak Ketiga dari Tiga bersaudara. Selama Hidup, Penulis telah menyelesaikan beberapa pendidikan SD pada SD Negeri 112141 Kampungbaru, Rantau Prapat tahun 2011, Melanjutkan sekolah ke SMP Negeri 1 Rantau Selatan, Rantau Prapat pada tahun 2014. Lalu melanjutkan ke SMA Negeri 1 Rantau Selatan, Rantau Prapat dan lulus pada tahun 2017. Setelah menempuh pendidikan selama 12 tahun, pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial Program Studi Administrasi Negara S-1. Pada tahun 2020 Penulis Melaksanakan Praktek Kerja Lapangan Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau. Kemudian pada tahun yang sama penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bandar Tinggi kecamatan Belah Hulu kabupaten Labuhan Batu, Selama kuliah Penulis juga aktif dalam berorganisasi. Pengalaman organisasi internal kampus penulis yaitu Himpunan Jurusan Ilmu Administrasi Negara (HMJ-ANA) periode 2017- 2018 dan 2018-2020 sebagai sekretaris Bidang Pengembangan sumberdaya Mahasiswa (PSDM). Serta juga aktif pada Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (DEMA) sebagai Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan. Penulis mengikuti ujian pada tanggal 20 April 2021 dengan Judul Skripsi ***“Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang***

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengolahan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK)”

dan dinyatakan lulus dan berhak menyandang Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.